

KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ERA REFORMASI DI INDONESIA

Samsuri

FISE Universitas Negeri Yogyakarta (e-mail: samsuri@uny.ac.id; HP: 081805950338)

Abstract: *The Civic Education Policy in the Reform Era in Indonesia.* This paper presents a preliminary study on civic education in the national educational policy during the reform era since 1998 in Indonesia. The reform movement has impacts on the reform of national education. Civic education has entered the changing paradigm to build good citizens. In the old paradigm, civic education mainly served the political regime hegemony. Civic education was reduced to value or character education per se. The politics of education in the new era has shifted the paradigm of civic education into the standardization according to democratic citizenship education norms. Civic education focuses more on how the competent teachers transform democratic values democratically.

Keywords: *reform, civic education, politics of education*

PENDAHULUAN

Studi Hosen (2003) terhadap reformasi politik dan hukum pada pemerintahan Presiden B.J. Habibie (1998-1999) menunjukkan bahwa upaya reformasi kehidupan politik, hukum, dan pemerintahan yang bersih telah dilakukan dengan intensif. Upaya tersebut kemudian membuahkan hasil berupa reformasi undang-undang tentang hak asasi manusia (HAM), yang mendukung "rule of law," dan proses politik, serta hukum yang mendukung terbentuknya "good governance" seperti pemberantasan korupsi (Hosen, 2003:202).

Dalam kawasan pendidikan, lahirnya Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah membawa dampak besar dalam reformasi pendidikan nasional itu sendiri. Di bidang pendidikan kewarganegaraan, dan umumnya dalam kuriku-

lum pendidikan formal di sekolah dasar hingga menengah, reformasi tidak hanya terbatas dalam substansi kajian, metode, dan sistem penilaiannya. Pembaharuan pendidikan kewarganegaraan telah bergeser kepada paradigma pembentukan warga negara demokratis sebagaimana idealitas universal dari misi pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Sebagaimana telah diketahui, bahwa paradigma pendidikan kewarganegaraan di Indonesia selama lebih dari tiga dekade era Orde Baru lebih banyak menitikberatkan kepada pembentukan karakter kepatuhan warga negara (siswa) terhadap tafsir resmi rezim politik. Kepatuhan warga negara terhadap tafsir rezim (pemerintah) dianggap sebagai kebajikan atau keutamaan warga negara (*civic virtues*) yang dilekatkan pada misi pendidikan kewarganegaraan ketika itu. Kepatuhan ini di satu sisi melahirkan